



Perwal Akomodasi Kebutuhan Disabilitas

JOGIA - Komitmen Pemkot Jogja terhadap penyandang disabilitas diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas. Perwal tersebut harus mampu mengakomodasi kebutuhan disabilitas tanpa ada diskriminasi. Pemerhati disabilitas dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Nurul Saadah Andriani, mengatakan adanya perwal tersebut tidak hanya untuk memenuhi hak-hak para disabilitas. ▶ Baca Perwal... Hal 11

Wujudkan Kota Inklusif, Bentuk Komite

PERVAL...
Sambungan dari hal 1

Perda itu, ujarnya, lebih kepada mendorong disabilitas agar memiliki kemandirian untuk menuju Kota Jogja yang inklusif. Selain itu, dia berharap pemerintah dapat memberikan rasa nyaman bagi komunitas minoritas penyandang disabilitas. "Fasilitas yang layak dan keberadaan teman disabilitas dapat mendapatkan pelayanan yang setara," terang Nurul saat diskusi bertema Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kota Jogja Inklusif di Hotel Ros In kemarin (10/6).

Untuk menuju kota inklusif, Jogja mesti mampu memberikan layanan dan menyediakan ruang yang aksesibel. Termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas. Kaum disabilitas perlu mendapatkan ruang gerak untuk bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Ini sesuai dengan kebutuhan khusus berdasar dari keberagaman dan perbedaan.

Dia berpendapat, dibentuknya komite disabilitas akan kukuhkan Jogja menjadi kota yang ramah bagi disabilitas di masa depan. Kebijakan yang dibuat pemkot harus mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. "Di antaranya, melaksanakan mediasi dan advokasi antara disabilitas dengan pemangku kepentingan," ungkapnya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Hadi Muhtar mengatakan, upaya mewujudkan Jogja sebagai kota ramah disabilitas didorong dengan membentuk komite. Komite tersebut akan memberikan rekomendasi kepada pemkot.

Komite ini dibentuk berdasarkan Perwal Nomor 8 Tahun 2014; Anggotanya adalah pegawai di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemkot dan pemerhati disabilitas. "Tugas komite memiliki fungsi di bidang sosial, perencanaan pembangunan, pendidikan, sarana, dan bidang hukum," papar Hadi.

Ada sejumlah program yang dilakukan pemkot untuk mewujudkan kota inklusif. Antara lain, memberikan fasilitas seperti guiding block di trotoar. Pemasangan *guiding block* ini diusahakan semaksimal mungkin. Sebab, sangat mungkin pembuatan guiding block menghalang pohon, tiang listrik, dan parker kendaraan di trotoar. Sedangkan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Masalah Sosial Dinsosnakertrans Kota Jogja Octo Noor Arafat mengatakan, mewujudkan kota inklusif harus dimulai dari kawasan Malioboro. Ini lantaran Malioboro akan menjadi pusat pedestrian.

Selain itu, pemkot berniat melakukan validasi data penyandang disabilitas pada 2015. Ini menjadi langkah awal untuk melaksanakan program inklusif. "Untuk tahun 2013 jumlah penyandang disabilitas di Kota sebanyak 2.357 orang. Sedangkan di Jogjakarta ada 28.196 orang," ujarnya. (hrp/amd/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005